

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan (obligation to answer) kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terhadap amanah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga bermanfaat sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah dalam mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Mengakhiri Tahun 2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dan disampaikan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja Biro Organisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan titik tolak perencanaan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/a/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB Tahun 2018;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 060/11/ORG Tanggal 11 Januari 2018 hal Penyampaian Dokumen Kinerja SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dengan :

- a. Memberikan informasi tentang peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah;
- b. Memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi, sistem manajemen dan prosedur ketatalaksanaan;
- c. Menginformasikan tentang pelaksanaan analisis jabatan dan peningkatan peran/fungsinya;
- d. Upaya pengembangan terjalannya komunikasi dan koordinasi yang mantap antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui pembinaan;
- e. Menginformasikan tentang upaya peningkatan kualitas sistem manajemen kepegawaian yang baik.

B. Gambaran Umum

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Organisasi merupakan Komplementer dari Sekretariat Daerah dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 15 Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

B.1.1. Tugas

Merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi serta Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

B.1.2. Fungsi

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi di bidang kelembagaan, tatalaksana dan reformasi birokrasi dan anajab dan kepegawaian;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, koordinasi fasilitasi dan pengkajian di bidang Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi;
- c. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengkajian di bidang Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian;
- d. Pelenyenggaraan pembinaan koordinasi dan fasilitasi program di bidang Kelembagaan, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi serta Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi serta Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian;
- f. Penyusunan Laporan di Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi serta Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian.

B.2. Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 Tentang



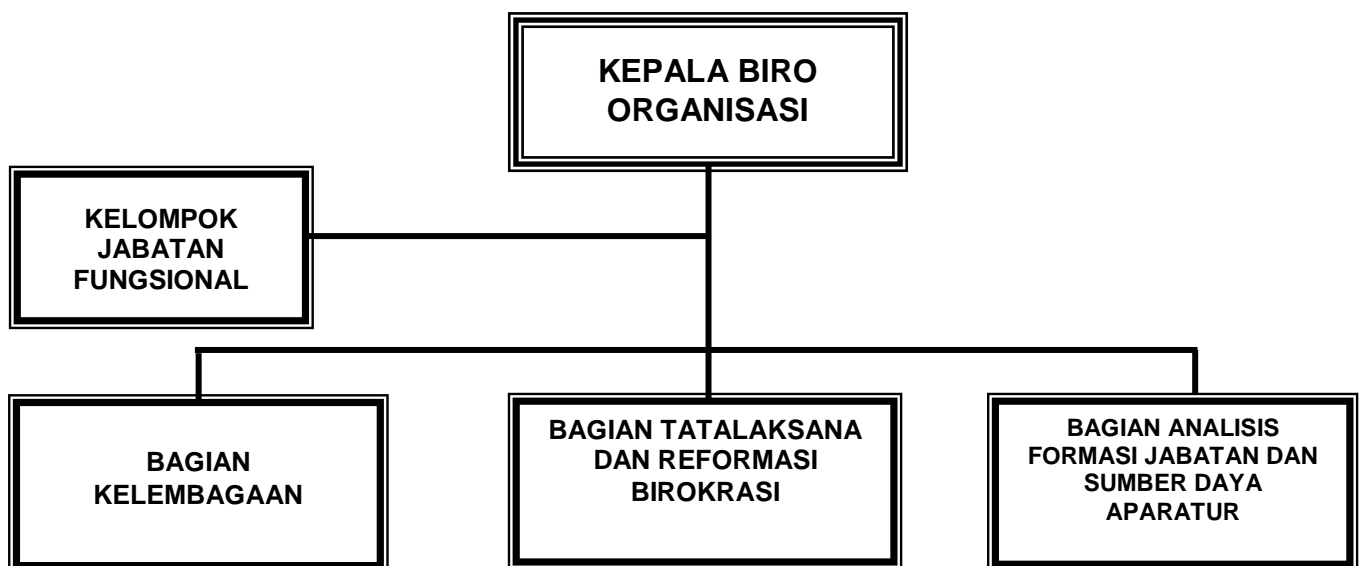
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebutkan Biro Organisasi terdiri dari :

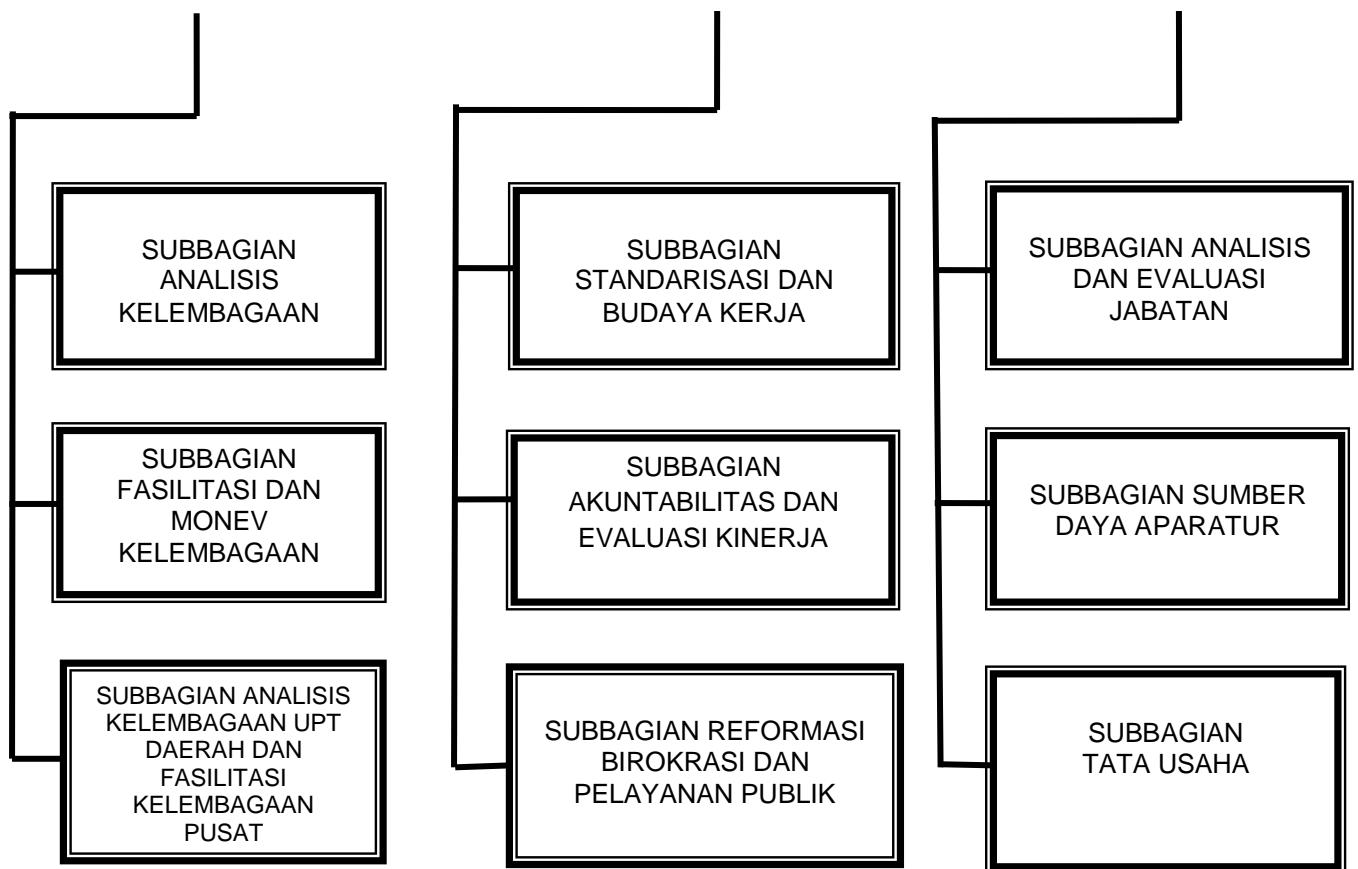
- a. Kepala Biro Organisasi;
- b. Bagian Kelembagaan, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Analisis Kelembagaan;
 - (2) Subbagian Fasilitasi Dan Monitoring Evaluasi Kelembagaan; dan
 - (3) Subbagian Analisis Kelembagaan UPT Daerah dan Fasilitasi Kelembagaan Pusat.
- c. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Standarisasi dan Budaya Kerja;
 - (2) Subbagian Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja; dan
 - (3) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- d. Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - (2) Subbagian Sumber Daya Aparatur; dan
 - (3) Subbagian Tata Usaha.

Dari Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, terdapat Jabatan Struktural sebanyak 13 orang, yaitu: Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang dan Eselon IV sebanyak 9 orang.

Dalam gambar, struktur organisasi tersebut di atas tampak sebagai berikut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT





Gambar (1.1) Bagan Struktur Organisasi

C. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Sejumlah permasalahan dan aspek strategis yang menjadi tantangan pembangunan pemerintah provinsi NTB yang memerlukan penanganan serius antara lain :

C.1. Permasalahan

- C.1.1. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi sehingga pada beberapa satuan kerja terjadi mismatch dalam kompetensi, distribusi pegawai tidak proporsional dengan beban kerja, kinerja aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin, pola karir belum dilaksanakan dengan baik, pendidikan dan latihan belum didasarkan kepada perencanaan kebutuhan;
- C.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) padap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja;

- C.1.3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun, dan teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- C.1.4. Pelaksanaan *bussines process* (SOP, SPM, SP, Tata Naskah Dinas) penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi;
- C.1.5. Kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, berkembangnya Lembaga Non Struktural sebagai amanat peraturan perundang-undangan sektoral;
- C.1.6. Belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja, belum optimalnya sistem /pemberian reward dan punishment.

C.2. Aspek Strategis.

Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian pada lingkungan strategis lokal, yaitu :

- C.2.1. Penataan system manajemen SDM aparatur sesuai dengan professionalisme dan kompetensi belum optimal;
- C.2.2. Kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan belum optimal;
- C.2.3. Penerapan SOP, SP dan SPM belum optimal dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- C.2.4. Terwujudnya aparatur birokrasi yang berdisiplin tinggi, berdedikasi dan amanah dalam melayani kepentingan masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, meliputi



capaian kinerja Biro Organisasi yang terdiri dari 3 bagian dan 9 Sub Bagian dan didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 40 Orang Pegawai terdiri dari :

- Pejabat Eselon II = 1 Orang
 - Pejabat Eselon III = 3 Orang
 - Pejabat Eselon IV = 9 Orang
- Jumlah = 13 Orang

Pejabat eselon II, III dan IV berjumlah 13 orang, 26 orang merupakan fungsional umum dan 1 orang fungsional tertentu. Pendidikan dari sejumlah pegawai tersebut mulai dari jenjang SLTP, SLTA/sederajat, Pendidikan D III, Pendidikan D IV, Tingkat Pendidikan SI dan Tingkat Pendidikan S2. Sedangkan menurut Golongan, Pegawai Biro Organisasi terdiri dari Golongan IV, III dan II.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB merupakan penjabaran teknis di bidang organisasi. Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023 meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam rangka melengkapi Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB telah disusun matrik rencana yang dituangkan dalam matrik Rencana Strategis. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Agar pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya visi dan misi organisasi. Visi merupakan harapan yang ingin dicapai dan dijabarkan melalui misi organisasi. Misi ditindak lanjuti dengan penetapan program-program yang secara aplikatif diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dari pada Biro Organisasi telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Visi

“Menjadi katalisator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna menjadikan perangkat daerah yang efektif, efisien dan melayani”.

Visi diatas dilatarbelakangi oleh kondisi obyektif daerah NTB dewasa ini serta hasrat masyarakat NTB untuk dapat sejajar dengan daerah lain sehingga diperlukan suatu program percepatan pembangunan yang melibatkan masyarakat, pemerintah serta para pihak terkait. Agar proses percepatan bisa dilaksanakan, maka segenap sumber daya yang ada harus dapat difungsikan secara optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial termasuk didalamnya pluralitas dan heterogenitas masyarakat.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan

memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 2.1. Meningkatkan kualitas dan manfaat hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara komprehensif;
- 2.2. Meningkatkan pelaksanaan *Business Process* penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar, sistem dan prosedur kerja birokrasi;
- 2.3. Meningkatkan kualitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah menuju organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- 2.4. Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS melalui penerapan sistem manajemen kepegawaian yang terorganisir.

3. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.1. Meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat daerah;
- 3.2. Meningkatkan sistem dan prosedur ketatalaksanaan;
- 3.3. Meningkatkan kualitas serta manfaat hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif;
- 3.4. Meningkatkan kualitas sistem manajemen kepegawaian yang baik.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara nyata dalam waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik kuantitatif sehingga dapat diukur, terinci dan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka *sasaran-sasaran* yang akan dicapai oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

- 4.1. Terwujudnya sistem pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan berdasarkan sistem remunerasi;
- 4.2. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 4.3. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) ;



4.4. Terwujudnya sistem manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Biro Organisasi masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan dan Program.

5.1. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 5.1.1. Usulan formulasi CPNS dan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Kediklatan;
- 5.1.2. Ketatalaksanaan;
- 5.1.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 5.1.4. SAKIP/LAKIP;
- 5.1.5. Penataan Kelembagaan;
- 5.1.6. Pembangunan SDM Kelembagaan;
- 5.1.7. Evaluasi Kelembagaan;
- 5.1.8. Administrasi Kelembagaan;
- 5.1.9. Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur;

5.2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5.2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 5.2.3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5.2.4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 5.2.5. Penataan Daerah Otonomi Baru;
- 5.2.6. Peningkatan Pelayanan Publik;

- 5.2.7. Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur;
- 5.2.8. Evaluasi Kinerja SKPD.
- 5.2.9. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- 5.2.10. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari program-program tersebut diatas, tidak semua program tertuang dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, akan tetapi semua program ada dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

6. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses perencanaan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan seperti indikator kerjanya serta perencanaan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja sasaran. Rencana kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 adalah program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang diuraikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB merupakan penjabaran tahunan yang disusun setiap awal tahun dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan merupakan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat informasi tentang :

- Sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan;
- Indikator Kinerja; dan
- Target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai keterkaitan yang logis dengan tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Untuk Perencanaan Kinerja Tahunan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi NTB Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	20 %
2.	Meningkatnya kualitas analisa formasi jabatan	Persentase Peningkatan analisa formasi jabatan berkualitas	10 %
3.	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Persentase Peningkatan kematangan tinggi perangkat daerah	5 %
4.	Meningkatnya kualitas standarisasi kinerja perangkat daerah	Persentase Peningkatan perangkat daerah berbudaya kinerja baik	10 %
5.	Meningkatnya kualitas standar pelayanan perangkat daerah	Persentase Peningkatan pelayanan perangkat daerah yang berstandar	5 %

7. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam melakukan manajemen kinerja yang baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi

perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dipilih dari berbagai indikator kinerja.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis, yang mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai bagian dari lampiran Keputusan Gubernur NTB Nomor 060.1-748 Tahun 2014. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan setelah di Reviu dan di Revisi sebagaimana terlampir pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-540 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai lampiran Keputusan Gubernur NTB Nomor 060.1-748 Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya sistem pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan berdasarkan sistem remunerasi.	1. Jumlah dokumen hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD dan UPTD/B berkaitan dengan jumlah kebutuhan/formasi pegawai dan dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta dokumen lainnya berkaitan dengan nilai jabatan dan SKM/SKT yang tersusun; 2. Jumlah dokumen kajian Anjab komprehensif/ menyeluruh bagi SKPD, UPTD/B yang tersusun	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
2.	Terwujudnya Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3. Peresentase Informasi Jabatan sebagai pedoman penataan, kepegawaian, ketatalaksanaan, Kelembagaan dan	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan,

	dan yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public	Pengawasan	Sumber Data dan Alasan
3.	Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan	4.Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (AKIP/LAKIP)	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
4.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	5.Jumlah dokumen Raperda/Perda, Rapergub/Pergub Kelembagaan Perangkat Daerah	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
5.	Terwujudnya sistem manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	6.Jumlah dokumen rancangan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan

Perubahan **kedua** atas indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB ditetapkan sebagai lampiran Keputusan Gubernur NTB Nomor 060-540 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Meningkatnya Tata Kelola pengaduan pelayanan Publik, Aparatur yang profesional, dan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan

Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB mengalami perubahan **ketiga**, sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	1. Persentase Perangkat Daerah tertata sesuai peraturan Perundang-Undangan	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
2.	Terwujudnya sistem pengelolaan kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Kediklatan, mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai pentuan Jabatan	2. Persentase Informasi Jabatan sebagai pedoman penataan, kepegawaian, ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Pengawasan	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
3.	Meningkatnya tata kelola pengaduan pelayanan public, aparatur yang professional, dan sarana prasarana pelayanann public yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.	3. Persentase Tingkat Penyelesaian Aduan pelayanan Publik	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
4.	Terwujudnya Rencana dan hasil monitoring evalasi pembangunan daerah yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja intansi pemerintah yang akuntabel dan transparan	4. Jumlah dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (LAKIP/LKjIP)	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan

Pada Tahun 2019 Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB mengalami perubahan **keempat** sesuai Keputusan Kepala Biro Organisasi Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Juli 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
2.	Meningkatnya kualitas analisa formasi jabatan	Persentase Peningkatan analisa formasi jabatan berkualitas	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
3.	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Persentase Peningkatan kematangan tinggi perangkat daerah	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
4.	Meningkatnya kualitas standarisasi kinerja perangkat daerah	Persentase Peningkatan perangkat daerah berbudaya kinerja baik	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan
5.	Meningkatnya kualitas standar pelayanan perangkat daerah	Persentase Peningkatan pelayanan perangkat daerah yang berstandar	Berisi tentang Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Alasan

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja tentang rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja oleh para pejabat penerima amanah pada suatu instansi pemerintah/unit kerja kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan capaian kinerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tekad dan janji tersebut dituangkan ke dalam suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja yang ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian kinerja di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 telah dituangkan ke dalam suatu pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Instansi/SKPD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Bulan Maret 2019. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB telah menandatangani kontrak kinerja dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2019. Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 sebagaimana yang telah disusun dengan tambahan anggaran setelah perubahan seperti pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	1. Persentase Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	50 %	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	223.660.300	219.470.300
2.	Meningkatnya kualitas analisa formasi jabatan	2. Persentase Peningkatan analisa formasi jabatan berkualitas	75 %	Program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	300.000.000	295.200.000
3.	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	3. Persentase Peningkatan kematangan tinggi perangkat	50 %	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	397.500.000	383.900.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
		daerah				
4.	Meningkatnya kualitas standarisasi kinerja perangkat daerah	4. Persentase Peningkatan perangkat daerah berbudaya kinerja baik	100 %	1. Program Reformasi Ketatalaksanaan 2. Program Peningkatan Budaya Kerja	61.600.000 46.885.000	61.600.000 46.885.000
5.	Meningkatnya kualitas standar pelayanan perangkat daerah	5. Persentase Peningkatan pelayanan perangkat daerah yang berstandar	100 %	Program peningkatan Pelayanan Publik.	228.367.000	196.717.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan media akuntabilitas yang berisi pertanggung jawaban amanah yang diemban, dan tanggungjawab penggunaan sumberdaya. Laporan kinerja juga menguraikan informasi terkait pelaksanaan, pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja keberhasilan pencapaian visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dan pencapaian target indikator kinerja sasaran atas Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja Tahun 2019, dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019, capaian kinerja Tahun 2019 dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun lalu dan beberapa tahun terakhir), dan capaian kinerja Tahun

2019 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (target akhir pada rencana strategis Biro Organisasi), Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Capaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis
Meningkatnya kematangan perangkat daerah

Bagian Kelembagaan merupakan salah satu dari tiga Bagian yang ada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang berupaya untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan dari sasaran tersebut, diukur dengan indikator yang disajikan pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan kematangan perangkat daerah

Indikator	Satuan	Tahun Awal Renstra	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap (%)				
			Target	Realisasi	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Laju kematangan tinggi perangkat daerah	Dokumen	2	88 UPTD/B 1 Dok	88 UPTD/B 1 Dok	100	100	100	100	100

Jumlah dokumen hasil kajian/naskah akademik kelembagaan perangkat daerah maupun Peraturan Gubernur dan Rekomendasi Gubernur sebanyak 88 UPTD/B dan 1 Dokumen telah terealisasi sesuai target tahun 2019 sebanyak 88 UPTD/B dan 1 Dokumen sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.

Capaian dokumen hasil kajian/naskah akademik Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Rekomendasi Gubernur Nomor 060/387/ORG Tanggal 26 November 2019 tentang Persetujuan Nomenklatur Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat.
- b. Rekomendasi Gubernur Nomor 060/395/ORG Tanggal 26 November 2019 tentang Persetujuan Nomenklatur Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur
- c. Rekomendasi Gubernur Nomor 060/390/ORG Tanggal 21 November 2019 tentang Persetujuan Nomenklatur Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat.
- d. Rekomendasi Gubernur Nomor 060/391/ORG Tanggal 21 November 2019 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD PPA Dinas P2KBP3A Kab Sumbawa
- e. Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
- f. Rapergub tentang Perubahan Ketiga atas Pergub 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB
- g. Rapergub tentang Perubahan Kedua atas Pergub 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi NTB
- h. Rekomendasi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa nomor 060/95/ORG tanggal 14 Maret 2019 Kota Bima
- i. Surat Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat nomor 060/121/ORG tanggal 2 April 2019
- j. Surat Rekomendasi Pembentukan UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 060/171/ORG tanggal 22 April 2019
- k. Rekomendasi Pembentukan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian nomor 060/170/ORG tanggal 23 Mei 2019 Kota Mataram
- l. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah nomor 060/208/ORG tanggal 28 Juni 2019 Kabupaten Sumbawa Barat
- m. Rekomendasi Gubernur pembentukan UPTD Kabupaten Lombok Barat dan

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas analisa formasi jabatan

Yang bertanggung jawab atas upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas adalah Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber daya Aparatur pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. yang disajikan pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan kualitas analisa formasi jabatan, mulai dari Perencanaan Formasi Pegawai sampai Penentuan Nilai Jabatan

Indikator	Satuan	Tahun Awal Renstra 2018	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap (%)				
			Target	Realisasi	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Jumlah Dokumen data Evaluasi Jabatan ASN	dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100
2. Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD	dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100
3. Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional dan Kebutuhan Diklat Jabatan Fungsional Tahun 2019	dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100

4. Jumlah Dokumen Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019	Dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100
5. Jumlah Dokumen Penataan Arsip	Dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100
6. Jumlah Dokumen syarat jabatan struktural	Dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100

Indikator kinerja seperti yang tersaji pada tabel tersebut diatas seluruhnya terealisasi seperti yang ditargetkan, hal tersebut berarti capaiannya mencapai 100%.

Upaya yang telah dilakukan Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas yaitu melalui program pengembangan sistem analisis jabatan dan pendayagunaan aparatur dengan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan formasi jabatan yaitu dengan tersusunnya dokumen data Evaluasi Jabatan OPD yang telah di upload di website resmi Kementerian PAN dan RB yaitu sihebatmenpan.go.id, dokumen dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD, dokumen Dokumen Jabatan Fungsional dan Kebutuhan Diklat Jabatan Fungsional, Dokumen Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019, Dokumen Penataan Arsip Biro Organisasi, tersusunnya dokumen syarat jabatan struktural, terlaksananya pelayanan konseling kasus kepegawaian lingkup Setda Pemerintah Provinsi NTB, , serta melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi/asistensi/ pendampingan ke kabupaten/kota Provinsi NTB.

Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas standar pelayanan perangkat daerah

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi berupaya menempuh kebijakan umum pembangunan daerah dengan mewujudkan, mengembangkan dan menerapkan SOP, SP dan SPM secara konsisten. Capaian sasaran strategis dan indikator tersebut diukur dengan beberapa indikator kinerja :

1. Persentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

Diera reformasi saat ini, pelayanan publik merupakan sektor yang semakin penting dan harus mendapat atensi, karena masyarakat semakin cerdas dan tahu akan hak-haknya. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat dalam menyelenggarakan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik oleh aparatur negara menjadi isu strategis yang harus dikelola dengan menyuguhkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra aparatur pemerintah. Persentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik sebagai indikator sasaran Terwujudnya SOP, SP dan SPM yang Memadai, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik, Aparatur yang professional dan sasaran prasarana pelaksanaan publik yang memadai dalam rangka meningkat kualitas pelayanan publik.

Indikator	Satuan	Tahun Awal RPJMD 2018	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap (%)				
			Target	Realisasi	Realisasi 2014 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2016 %	Realisasi 2017 %	Realisasi 2018 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Persentase Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Jumlah Perangkat daerah (PD) Pemerintah provinsi NTB yang menyusun SOP sesuai Perundang-undangan yang berlaku.	PD/SKPD	2	45	45	100	100	100	100	100
3. Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi di Tingkat Nasional	UKPP	1	3	3	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja tersebut diatas melalui **program** Peningkatan pelayanan publik dengan **kegiatan** Peningkatan Pelayanan Publik. Adapun rincian kegiatan Pelayanan Publik, memfasilitasi pelaksanaan penilaian Pelayanan

Publik, menyusun Laporan Pembinaan/Monev/Koordinasi Bidang Pertanian, menyusun laporan penilaian eNTeBeNOVIK, yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 juga menjadi indikator utama Pemerintah Provinsi NTB.

PD/SKPD pengelola utama dan pendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi. Jadi dengan tercapainya indikator tersebut diatas seratus persen merupakan prestasi bagi Pemerintah Provinsi NTB yang telah berupaya menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik.

Peningkatan pelayanan publik telah dilaksanakan melalui Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi Bidang Pertanian ditingkat Provinsi/Nasional.

Pada tahun 2019 ini telah dilaksanakan pembinaan unit kerja pelayanan publik dipersiapkan dan diusulkan untuk dinilai kinerjanya. Hasil daripada kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penilaian kinerja unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian capaian indikator kinerja tercapai 100% sama dengan tahun sebelumnya 2018.

Dari capaian indikator sasaran tersebut diatas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

a. eNTeBeNOVIK

- Yang mengikuti pendaftaran Inovasi PD/SKPD yaitu 58 inovator;
- Lolos administrasi sebanyak 32 inovasi; dan
- Setelah mengikuti ekspose dan wawancara berhasil lolos menjadi Top 10

Tabel 3.5.
TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovator	Judul Proposal	SKPD
1	dr. Sapto Sutardi	APLIKASI “dr.Sapto Anthro”	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
2	Fatwadi, S.Si.,M.Ak	E-ReCallSeri (E-Reservasi Call Centre dan Self Registration) Terintegrasi	RSUD Kota Mataram

3	Najamuddin., S.Sos, M.M	Tatakelola Pemerintahan ala Manajemen PRCC NTB	Biro Humas Provinsi NTB
4	Tribhuana Tunga Dewi., ST	Integrasi Gerakan dan Sestim Informasi Pasar Tradisional - SI GESIT	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima
5	DR. Fauzan, M.Pd	"Gerakan Sapu Bersih Drop Out"	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
6	Tresnahadi., S.PT	"JARING PEKAT" (Penjaringan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat) Kabupaten Lombok Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara
7	Laily Ramdhani., S.STP	"KUPU KUPU BIMA" Kios Untuk Produk Kelompok Usaha Perempuan Bima	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima
8	Aditya Firdaus., A.Md	Sistem Informasi Pendidikan dan Jejaring (SIDIK JARI)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
9	Tim "RASI"	RASI (Rumah Singgah)	RSUD Provinsi NTB
10	Sumi Abdi, ST	Sistem Informasi Perumahan Berbasis Teknologi (SIPERA)	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)

Diusulkan ke MENPAN RB RI sebanyak 10 inovasi pada Tahun 2020.

Tabel 3.6.
TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovator	Judul Proposal	SKPD
1	dr. Sapto Sutardi	APLIKASI "dr.Sapto Anthro"	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
2	Fatwadi, S.Si.,M.Ak	E-ReCallSeri (E-Reservasi Call Centre dan Self Registration) Terintegrasi	RSUD Kota Mataram

3	Najamuddin., S.Sos, M.M	Tatakelola Pemerintahan ala Manajemen PRCC NTB	Biro Humas Provinsi NTB
4	Tribhuana Tungga Dewi., ST	Integrasi Gerakan dan Sistem Informasi Pasar Tradisional - SI GESIT	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima
5	DR. Fauzan, M.Pd	"Gerakan Sapu Bersih Drop Out"	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
6	Tresnahadi., S.PT	"JARING PEKAT" (Penjaringan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat) Kabupaten Lombok Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara
7	Laily Ramdhani., S.STP	"KUPU KUPU BIMA" Kios Untuk Produk Kelompok Usaha Perempuan Bima	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima
8	Aditya Firdaus., A.Md	Sistem Informasi Pendidikan dan Jejaring (SIDIK JARI)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
9	Tim "RASI"	RASI (Rumah Singgah)	RSUD Provinsi NTB
10	Sumi Abdi, ST	Sistem Informasi Perumahan Berbasis Teknologi (SIPERA)	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Bagian Tatalaksana merupakan salah satu Bagian pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB sebagai pengelola utama dan pendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas melalui **program** peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan **kegiatan** penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) dan **Program** Evaluasi Kinerja SKPD dengan **kegiatan** Penilaian Kinerja SKPD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian dari sasaran dan indikator kinerja tersebut diatas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

Capaian Indikator Sasaran terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan

Indikator	Satuan	Tahun Awal Renstra	Tahun 2019		Capaian 2019 Terhadap (%)				
			Tar get	Realisasi	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Jumlah Dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (SAKIP/LAKIP/LKjIP)	Dokumen	1	1	1	100	100	100	100	100

Capaian sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (LAKIP/LKjIP).

Untuk merealisasikan indikator tersebut telah disusun dalam bentuk dokumen laporan yaitu dokumen LKjIP/LAKIP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB dan dokumen LKjIP/LAKIP Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019. Dalam kegiatan ini Biro Organisasi tidak hanya menyusun kedua jenis laporan tersebut akan tetapi menyusun dokumen bahan lainnya yang terkait dengan SAKIP dan LKjIP/LAKIP yaitu RENSTRA, IKU, RKT, PK, RENCANA AKSI, Laporan Kinerja Berdasarkan PK yang dilaporkan setiap Triwulan, juga dilakukan asistensi/pendampingan/fasilitasi kepada PD/SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian penyusunan segala bentuk instrument sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terpenuhi. Dokumen-dokumen terkait SAKIP lainnya yang disusun yaitu dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen LKjIP/LAKIP Pemerintah Provinsi NTB, LKjIP/LAKIP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan menjadi lampiran Keputusan Gubernur Nomor 060.1-748 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang ditetapkan tanggal 27 November 2014, dan Reviu/Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 060-540 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), DPA dan DPAP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. Indikator tersebut telah terealisasi 100%.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan selain menjadi dokumen pertanggung jawaban keuangan juga disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya.

Sementara itu terkait dengan penilaian terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB yang dievaluasi setiap tahun oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 di serahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Hotel Inaya Putri Kawasan Wisata Nusa Dua Lot S-3 Benoa Kabupaten Badung Bali Tanggal 26-27 Januari 2020, yang di rangkai dengan Coaching Clinic kepada

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Regional II. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Predikat Nilai BB (Baik) dengan nilai skor 70,05 meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu 62,53. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi NTB sudah menunjukkan hasil yang **Sangat Baik**. Rincian penilaian tersebut seperti pada table berikut :

Tabel 3.8.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB

Tahun 2014 s.d. 2019

No	Komponen Yang Dinilai	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		B O B O T	N I L A I	B O B O T	N I L A I	B O B O T	N I L A I	B O B O T	N I L A I	B O B O T	N I L A I	B O B O T	N I L A I
1	Perencanaan Kinerja	35	20,28	30	19,21	30	20,49	30	21,47	30	21,98	30	23,57
2	Pengukuran Kinerja	20	10,78	25	14,90	25	15,21	25	15,14	25	15,50	25	17,34
3	Pelaporan Kinerja	15	8,30	15	8,37	15	8,50	15	9,05	15	9,67	15	11,48
4	Evaluasi Internal	10	7,10	10	5,59	10	6,30	10	5,30	10	4,82	10	6,33
5	Capaian Kinerja	20	11,67	10	10,58	20	10,14	20	10,05	20	10,56	20	11,32
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,13	100	58,65	100	60,64	100	61,01	100	62,53	100	70,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC		B		B		B		BB

Dari hasil penilaian oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hal-hal yang baik dari segi perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja, akan dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah termasuk dengan melakukan pengembangan e-SAKIP.

Sedangkan penilaian Kinerja tingkat PD/SKPD khususnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 yang dievaluasi pada Bulan Juli 2019 oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan hasil seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.9.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019

No	Komponen Yang Dinilai	2019	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,57
2	Pengukuran Kinerja	25	17,34
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48
4	Evaluasi Internal	10	6,33
5	Capaian Kinerja	20	11,32
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Dari hasil evaluasi tersebut diatas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi guna perbaikan seperti merevisi Renstra yang akan disesuaikan dengan indikator kinerja, tujuan, sasaran, didalam Renstra agar selaras dengan program dan indikator prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan monitoring dan evaluasi yang proses pelaksanaannya secara terprogram setiap tahun, didalam penerapan indikator kinerja pada setiap dokumen terkait instrument SAKIP.

Data capaian indikator kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan data pencapaian realisasi kinerja dari indikator-indikator tersebut diatas semuanya berdasarkan data-data dan informasi dari masing-masing Bagian lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, sehingga dapat tersaji seperti dalam laporan kinerja ini.

Upaya lain untuk mendukung pencapaian dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diatas, juga dilakukan penyusunan indikator kinerja utama, bimbingan teknis SAKIP, pembinaan, fasilitasi, asistensi, pendampingan, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait dengan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik di tingkat daerah/pusat.

Rincian capaian masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama antara Kepala Biro Organisasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10.

Rincian Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	1. Jumlah dokumen hasil kajian/naskah akademik /raperda/ perda dan rapergub/pergub kelembagaan perangkat daerah;	5 Dokumen	5 Dokumen	100
2.	Terwujudnya sistem pengelolaan kelembagaan ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan, mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan	2. Peraturean Gubernur NTB tentang Hasil Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK	1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Jumlah Pedoman Syarat Jabatan Adminisrator	1 dokumen (20 PJPA)	1 dokumen (20 PJPA)	100
		4. Jumlah Dokumen evaluasi jabatan untuk penentuan nilai kelas jabatan	1 dokumen 34 PD	1 dokumen 34 PD	100
3.	Terwujudnya Standar Operasional Prosedure (SOP). Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	5. Persentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik;	100%	100%	100
		6. Jumlah Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi NTB yang menyusun SOP sesuai perundang-undangan yang berlaku.	45 PD/SKPD	45 PD/SKPD	100
		7. Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi di Tingkat Nasional.	3 UKPP	3 UKPP	100
		8. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB.	1 dokumen	1 dokumen	100

Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi pada Tahun 2019 berhasil walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan hambatan dengan intensitas kecil, kondisi ini dapat dilihat dari persentase realisasi masing-masing indikator kinerja yang rata-rata mencapai angka 100%. Dari data yang ada maka dapat dihitung persentase rata-rata dari 5 (lima) Sasaran Strategis dan atau Sasaran Program adalah 100 %, sehingga secara rata-rata jelas terlihat bahwa tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi memiliki hasil yang baik.

Faktor penunjang keberhasilan program/kegiatan Biro Organisasi disebabkan oleh:

- a. Kemampuan SDM yang memadai;
- b. Sistem komputerisasi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan membantu produktivitas dan efisiensi;
- c. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas dari semua bagian pada Biro Organisasi;
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam percepatan proses pengelolaan keuangan;
- e. Adanya dukungan melalui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro;
- f. Peraturan bersifat normatif yang tegas dan jelas dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan yang ada pada Biro Organisasi pada Tahun 2019, permasalahan dapat dikurangi sehingga masalah dapat ditekan seoptimal mungkin, namun demikian permasalahan tetap saja ada, antara lain :

1. Belum optimalnya pemahaman unit kerja/aparatur Pemerintah dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Triwulan dan Tahunan), RKT, PK, Rencana Aksi, Renstra, IKU, SOP serta SPM PD/SKPD sehingga penyelesaian penyusunan dokumen tersebut sering terlambat;
2. Pelayanan Publik masih perlu ditingkatkan kualitasnya;
3. Indikator kinerja, program dan kegiatan dalam rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi pada Tahun 2019, tidak sepenuhnya tersedia dana yang cukup dan khusus untuk melaksanakannya.

Terhadap permasalahan yang ada telah dilakukan langkah-langkah antisipatif yang dapat diambil guna pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut:

1. Mengoptimalkan kemampuan aparatur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PK, IKU, RKT, RA, Renstra dan SOP serta SPM melalui pembinaan, asistensi, fasilitasi, pendampingan kepada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Daerah;
2. Peningkatan, pembinaan dan pemberian penghargaan kepada unit kerja pelayanan publik yang berprestasi;
3. Dilakukan pembinaan atau sosialisasi secara intensif ke Kabupaten/Kota se NTB dalam rangka penataan kelembagaan/penataan SKPD;

4. Mengintensifkan koordinasi intern Biro dalam hal perencanaan program dan penganggaran;
5. Untuk kedepannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terprogram setiap tahunnya sehingga terjadi keselarasan antar dokumen-dokumen terkait SAKIP (mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan) baik dari segi kinerja maupun pendanaannya.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dapat digambarkan mengenai target dan realisasi APBD yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Tahun Anggaran 2019, dibiayai dengan sumber dana sebagai berikut :

B.1. Realisasi anggaran berdasarkan DPPA Biro Organisasi

Realisasi anggaran program dan kegiatan berdasarkan DPA dan DPPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.11.

Akuntabilitas Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Tahun Anggaran 2019

No	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu. %	Fisik %	Sisa Anggaran
I	Belanja Tidak Langsung					
1	APBD	1.213.804.000,00	853.808.000	70,34	100	359.996.000
	Rutin	-	-	-	-	-
	Pembangunan	-	-	-	-	-

2.	APBN	-	-	-	-	-
3.	Sumber lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah I		1.213.803.900,00	853.808.000	70,34	100	359.996.000
II	Belanja Langsung					
1.	APBD	Rp.1.945.335.500	Rp. 1.913.912.566	98,38	100	31.422.934
	Rutin	-	-	-	-	-
	Pembangunan	-	-	-	-	-
2.	APBN	-	-	-	-	-
3.	Sumber lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah II		Rp.1.945.335.500	Rp. 1.913.912.566	98,38	100	31.422.934
Jumlah I + II		3.159.139.500	2.767.720.556	87,61	100	391.418.934

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas, alokasi anggaran pada DPPA Tahun 2019 sebesar Rp. 3.159.139.500,00,- Jumlah realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.767.720.556 (87,61%) dengan pencapaian fisik 100%.

Terhadap capaian sasaran strategis pada Biro Organisasi secara keseluruhan seperti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi sebesar 100% didukung oleh capaian beberapa indikator kinerja.

B.2. Realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja

Pagu dan realisasi program anggaran berdasarkan Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Akuntabilitas Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	1 Jumlah dokumen hasil kajian/naskah akademik /raperda/ perda dan rapergub/pergub kelembagaan perangkat daerah	Program : Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan : 1. Penataan Kelembagaan Daerah 2. Evaluasi Kelembagaan UPTD/UPTB	397.500.000	383.900.000	376.940.765	98,19
2.	Terwujudnya	2 Peraturan	Program	300.000.000	295.200.000	292.967.730	99,74

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	sistem pengelolaan kelembagaan ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan, mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan	<p>Gubernur NTB tentang hasil Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK</p> <p>2 Jumlah Pedoman syarat Jabatan Administrator</p> <p>3 Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan Untuk penentuan Nilai dan Kelas Jabatan</p>	<p>:Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1.Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi jabatan</p> <p>2.Pengembangan Sumber Daya Aparatur</p>				
3.	Terwujudnya Standar Prosedure (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.	<p>1 Persentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik</p> <p>2 Jumlah Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi NTB yang menyusun SOP sesuai Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3 Jumlah unit kerja pelayanan publik (UKPP) yang berprestasi di tingkat nasional;</p>	<p>Program Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Publik</p>	228.367.000	196.717.000	196.424.457	99,85
4.	Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan	<p>1 Jumlah dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (SAKIP/LAKIP/ LKJIP);</p>	<p>Program : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)</p> <p>Program : Evaluasi Kinerja SKPD</p> <p>Kegiatan : Penilaian Kinerja SKPD</p>	223.660.300	219.470.300	211.850.197	96,53
				60.000.000	59.412.700	54.554.700	91,82

C. Penghargaan

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB melakukan pembinaan dengan memfasilitasi Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik yang ada pada



Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB (eNTeBeNOVIK). Pada Tahun 2019 dari 10 Inovasi yang diusulkan, Hasil evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai oleh kementerian PAN dan RB RI mendapat nilai 70,05 kategori BB, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatalaksana pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kualitas analisa formasi jabatan
3. Meningkatkan kualitas laporan SAKIP Perangkat Daerah

4.1.2 Indikator Tujuan

- 1 Persentase Inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah
- 2 Nilai Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 3 Tingkat efektifitas organisasi

4.1.3 Sasaran

- 1 Mewujudkan unit kerja pelayanan publik yang berprestasi dan survey kepuasan masyarakat meningkat.
- 2 Mewujudkan perangkat daerah berkualitas dan akuntabel serta pendayagunaan aparatur yang baik
- 3 Mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang baik.

4.1.4 Indikator Sasaran

- 1 Persentase pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang bernilai sangat baik.
- 2 Persentase dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja yang termanfaatkan.
- 3 Persentase perangkat daerah dengan kematangan tinggi.
- 4 Persentase unit kerja pelayanan publik yang berprestasi.
- 5 Persentase unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik.

4.1.5 Program

- 1 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- 2 Evaluasi kinerja SKPD.
- 3 Pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur.
- 4 Penataan daerah otonomi baru.
- 5 Reformasi ketatalaksanaan.
- 6 Peningkatan budaya kerja.

7 Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.1.6 Indikator Program

- 1 Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A/BB.
- 2 Persentase perangkat daerah yang akuntabel.
- 3 Persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun.
- 4 Persentase perangkat daerah /UPTD/UPTB yang ditata.
- 5 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik.
- 6 Persentase perangkat daerah yang menerapkan Budaya Kerja dengan baik.
- 7 Jumlah unit kerja pelayanan publik yang berprestasi
- 8 Persentase unit kerja pelayanan publik yang survey kepuasan meningkat.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja pada tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatalaksana pemerintahan	Persentase Inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah	Mewujudkan unit kerja pelayanan publik yang berprestasi dan survey kepuasan masyarakat meningkat.	Persentase unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik	60	80	100	100	100
			Persentase unit kerja pelayanan publik berprestasi..	40	60	80	100	100
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kualitas analisa formasi jabatan	Tingkat efektifitas organisasi	Mewujudkan perangkat daerah berkualitas dan akuntabel serta pendayagunaan aparatur yang baik	Persentase dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja yang termanfaatkan	80	90	100	100	100
			Persentase perangkat daerah dengan kematangan tinggi	85	90	95	95	100
Meningkatkan kualitas laporan SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang baik.	Persentase pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang bernilai sangat baik	70	80	90	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan Biro Organisasi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tabel berikut :

TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<i>MISI 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Mewujudkan pelaporan akuntabilitas kinerja OPD sangat baik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja
	Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas		.
	Mewujudkan dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun baik		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Mewujudkan unit kerja pelayanan publik berprestasi	Peningkatan standarisasi pelayanan pada unit pelayanan publik	Mingkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
	Mewujudkan unit kerja pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif**

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023. dapat dilihat pada table berikut :



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator program	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target kinerja pada tahun ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
								1	2	3	4	5	
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas laporan SAKIP Pemerintah Daerah Daerah	Nilai Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik	Persentase pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang bernilai sangat baik	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase laporan kinerja yang sangat baik	70	75	80	90	100	100	100
					Evaluasi kinerja SKPD	Persentase perangkat daerah yang akuntabel	50	75	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kualitas analisa formasi jabatan	Tingkat efektifitas organisasi	Mewujudkan perangkat daerah yang berkualitas dan akuntabel serta pendayagunaan aparatur yang baik.	Persentase dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja yang termanfaatkan	Pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	Persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	80	90	100	100	100	100	100
				Persentase perangkat daerah dengan kematangan tinggi	Penataan daerah otonomi baru	Persentase perangkat daerah/UPTD/UPTB yang ditata	75	85	90	95	95	100	100

4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatalaksana pemerintahan	Persentase Inovasi Pelayanan Publik pemerintah daerah	Mewujudkan unit kerja pelayanan publik yang berprestasi dan survey kepuasan masyarakat meningkat	Persentase unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik	Reformasi ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	75	80	90	100	100	100	100
					Peningkatan budaya kerja	Persentase perangkat yang menerapkan BUDAYA KERJA secara baik	60	70	80	90	100	100	100
				Persentase unit kerja pelayanan publik yang berprestasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah unit kerja pelayanan public yang berprestasi	3	9	15	21	27	34	34



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna pencapaian **visi** dan **misi** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023, maka Biro Organisasi memiliki tanggungjawab menyelenggarakan misi ke 2 (dua) **“NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi”**.

Dengan target yang telah ditetapkan setiap tahun, Biro Organisasi harus mampu menentukan program dan kegiatan setiap tahun sebagai bagian dari skenario pencapaian tujuan jangka menengah. Strategi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perlu dikembangkan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan.

Selain itu monitoring dan evaluasi perlu dilakukan melalui struktur dan mekanisme yang efektif sehingga indikator-indikator kinerja pada setiap tingkatan dapat dicapai sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan. Persoalan dan hambatan supaya dapat dieliminir dari waktu ke waktu sehingga pencapaian target organisasi tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dilakukan lebih terarah, efisien, efektif dan akuntabel.

Atas perhatian semua pihak dengan tersusunnya Renstra ini diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Kepala Biro Organisasi

H. Yusron Hadi, ST, MUM

BAB IV

P E N U T U P

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan hasil pengukuran, analisa dan evaluasi kinerja Biro Organisasi selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan sasaran, indikator, program, kegiatan dan pendanaannya. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga telah diupayakan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja.

Pencapaian kinerja yang sesuai target yang telah ditetapkan tidak lepas dari komitmen perencanaan pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor diluar kendali namun Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di Tahun 2019. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja untuk tahun yang akan datang.

Dari Data Rencana Strategis dan Data Capaian Kinerja Biro Organisasi dapat disampaikan sebagai berikut :

- Program pengembangan dan kebijakan Biro Organisasi pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang diupayakan secara optimal.
- Upaya-upaya peningkatan kinerja Biro Organisasi melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas program yang tertuang dalam Renstra dengan memperhitungkan peluang dan kendala yang ada dan faktor-faktor frekuensi keberhasilan.

- Dengan tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 rata-rata 100 % serta realisasi pelaksanaan anggaran/keuangan 87,61 % dan realisasi fisik 100 % dapat dikategorikan berhasil (baik).

Berdasarkan uraian diatas baik permasalahan yang ada maupun capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018 agar pelaksanaan dan capaian kinerja tahun selanjutnya dapat lebih maksimal, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB akan meminimalkan hambatan dari faktor eksternal dan faktor internal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup Biro Organisasi, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun lainnya yang telah ikut mengambil bagian dan berpartisipasi aktif membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang dijiwai semangat kebersamaan untuk mencapai visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB periode 2018-2023.

